

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Wilayah pesisir sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut memiliki karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi yang unik dan layak untuk dipertahankan. Keanekaragaman potensi sumber daya alam di wilayah pesisir merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran sangat signifikan dalam pengembangan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan masyarakat pesisir. Pengembangan potensi sumber daya alam di wilayah pesisir tentunya akan melibatkan beberapa pihak terkait, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya yang seyogianya dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Luas area mangrove di wilayah pesisir Kota Semarang sebesar 84,47 ha, dengan luas terbesar terdapat di wilayah Kecamatan Tugu, sedangkan luas area pertambakan sebesar 1.030,21 ha. Luas area pertambakan di wilayah pesisir Kota Semarang telah mengalami penurunan dari 1,044,21 ha pada tahun 2005 menjadi 1,030,21 ha pada tahun 2009, sedangkan produksi perikanan mengalami penurunan dari 615,40 ton pada tahun 2005 menjadi 456,80 pada tahun 2008 (Statistik Perikanan Kota Semarang Tahun 2009). Berdasarkan kondisi tersebut maka diperlukan sebuah upaya pengelolaan wilayah pesisir yang salah satunya dengan mengembangkan potensi sumber daya alam yang ada pada ekosistem hutan mangrove Tugurejo di Kota Semarang.

Beberapa permasalahan dalam pengelolaan sumber daya laut dan pesisir di Kota Semarang meliputi:

1. Meningkatnya luasan daratan pesisir yang terkena abrasi pantai, terutama di Kecamatan Tugu sepanjang 1,7 km dan Kecamatan Genuk sepanjang 2,54 km.
2. Berkurangnya luasan area mangrove di bantaran sungai dan sekitar area pertambakan di Kecamatan Tugu dan Genuk.
3. Cenderung menurunnya luas area pertambakan di Kecamatan Tugu dan Genuk akibat semakin meluasnya abrasi pantai.
4. Menurunnya produksi perikanan tambak dari 824 ton pada tahun 2004 menjadi 456,80 ton pada tahun 2008 atau terjadi penurunan sebesar 44,56% akibat terjadinya abrasi pantai dan pencemaran sungai dari kegiatan industri dan rumah tangga. Kegiatan perikanan tambak

terutama terdapat di Kecamatan Tugu dan Genuk (Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang, 2010).

Kecamatan Tugu memiliki luas area mangrove sebesar 217,400 ha dan luas area pertambakan sebesar 795,67 ha. Luas area pertambakan cenderung mengalami penurunan luas area pertambakan akibat terjadinya alih fungsi lahan untuk permukiman dan industri serta terjadinya abrasi pantai akibat naiknya permukaan air laut, yang berdampak pada tidak optimalnya pemanfaatan area pertambakan. Berdasarkan citra satelit diketahui bahwa pada tahun 1999-2005 di Kecamatan Tugu telah terjadi abrasi pantai seluas 186,60 ha, termasuk tenggelamnya Pulau Tirang yang terdapat di wilayah ini (Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang, 2010).

Berdasarkan kajian dari Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro (2002) dijelaskan beberapa isu pokok pengelolaan hutan mangrove di Wilayah Pesisir Tugurejo yang meliputi:

1. Isu ekologi dan sosial ekonomi

Wilayah Pesisir Tugurejo, khususnya Dukuh Tapak telah terjadi perubahan garis pantai dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dan hilangnya area pertambakan sekitar tahun 1998. Degradasi lingkungan tersebut diakibatkan oleh adanya kenaikan permukaan air laut dan pencemaran dari berbagai kegiatan industri di sekitar lokasi. Sementara isu sosial dan ekonomi yang muncul meliputi kebiasaan masyarakat yang memanfaatkan sumber daya mangrove untuk keperluan rumah tangga, status kepemilikan lahan, dan kegiatan masyarakat yang mengkonversi hutan mangrove menjadi area pertambakan dan pertanian.

2. Isu kelembagaan dan perangkat hukum

Peranan pemerintah secara kelembagaan dan kebijakan dalam upaya pengelolaan ekosistem hutan mangrove di Wilayah Pesisir Tugurejo sudah cukup banyak, diantaranya melalui pembentukan Kelompok Kerja Mangrove Kota Semarang (KKMKS), dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang sebagai "*leading sector*" kelompok tersebut. Masih perlunya penguatan koordinasi antara instansi terkait dan penegakan hukum akan memberi kontribusi bagi upaya pelestarian ekosistem hutan mangrove seluas 1,2 km² tersebut.

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam mendukung program pengelolaan hutan mangrove di Wilayah Pesisir Tugurejo diantaranya dengan bekerja sama dengan Mercy Corps, sebuah organisasi nirlaba (LSM) dari Amerika Serikat melalui Program ACCCRN (Asian Cities Climate Change Resilience Network). Proyek percontohan ACCCRN dilaksanakan pada tahun 2010 di Dusun Tapak, Kelurahan Tugurejo dengan melakukan penanaman tidak kurang dari 20.000 bibit mangrove dan pembuatan tanggul penahan ombak

atau lebih dikenal sebagai alat pemecah ombak (APO) yang terbuat dari ban bekas mobil sejauh 120 meter di sepanjang garis pantai wilayah pesisir Tugurejo. Tahun 2011 Pemerintah Kota Semarang bekerja sama dengan masyarakat Tapak melalui Program ACCCCRN telah melakukan penanaman lebih dari 285.000 bibit mangrove dan pembuatan APO yang mencapai panjang 785 meter dari panjang 1.900 meter yang dibutuhkan. Tahun 2012 ini sekitar satu miliar rupiah telah diajukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang untuk membeli sebidang tanah di Tugurejo dari pihak swasta yang akan digunakan untuk mendirikan Pusat Pendidikan Bakau dan Konservasi Berbasis Masyarakat di Tugurejo (Mercy Corps, 2012).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa diperlukan sebuah upaya melengkapi program pengembangan wilayah pesisir Kota Semarang, yaitu upaya pengelolaan wilayah pesisir ke arah daratan, khususnya pada Kawasan Hutan Mangrove Tugurejo yang secara keseluruhan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pesisir Kota Semarang. Pengembangan wanamina sebagai sebuah strategi pelestarian ekosistem hutan mangrove merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan. Sebagai langkah awal dalam mendukung program pengembangan wilayah pesisir, maka Strategi Pengembangan Wanamina pada Kawasan Hutan Mangrove Tugurejo Kawasan Hutan Mangrove Tugurejo di Kota Semarang perlu dilakukan.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, beberapa perumusan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana kondisi umum Kawasan Hutan Mangrove Tugurejo?
2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap Kawasan Hutan Mangrove Tugurejo?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pelestarian Kawasan Hutan Mangrove Tugurejo?
4. Bagaimana bentuk kelembagaan yang sesuai dengan konsep pengembangan wanamina pada Kawasan Hutan Mangrove Tugurejo?
5. Apa saja faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) dari objek penelitian yang dapat mendukung pengembangan wanamina pada Kawasan Hutan Mangrove Tugurejo?

6. Bagaimana strategi yang dapat diterapkan dalam pengembangan wanamina pada Kawasan Hutan Mangrove Tugurejo?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, beberapa tujuan dalam penelitian ini meliputi:

1. Analisis kondisi umum ekosistem Kawasan Hutan Mangrove Tugurejo.
2. Analisis persepsi masyarakat terhadap Kawasan Hutan Mangrove Tugurejo.
3. Analisis partisipasi masyarakat terhadap pelestarian Kawasan Hutan Mangrove Tugurejo.
4. Analisis bentuk kelembagaan yang sesuai untuk mendukung pengembangan wanamina pada Kawasan Hutan Mangrove Tugurejo.
5. Analisis faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) dari objek penelitian yang dapat mendukung pengembangan wanamina pada Kawasan Hutan Mangrove Tugurejo.
6. Rumusan strategi pengembangan wanamina pada Kawasan Hutan Mangrove Tugurejo.

1.4. Manfaat Penelitian

Studi strategi pengembangan wanamina pada Kawasan Hutan Mangrove Tugurejo di Kota Semarang diharapkan dapat menjadi alternatif strategi yang tepat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Mangrove Tugurejo.

1.5. Keaslian Penelitian

Beberapa penelitian tentang wanamina yang pernah dilakukan disajikan pada Tabel 1.

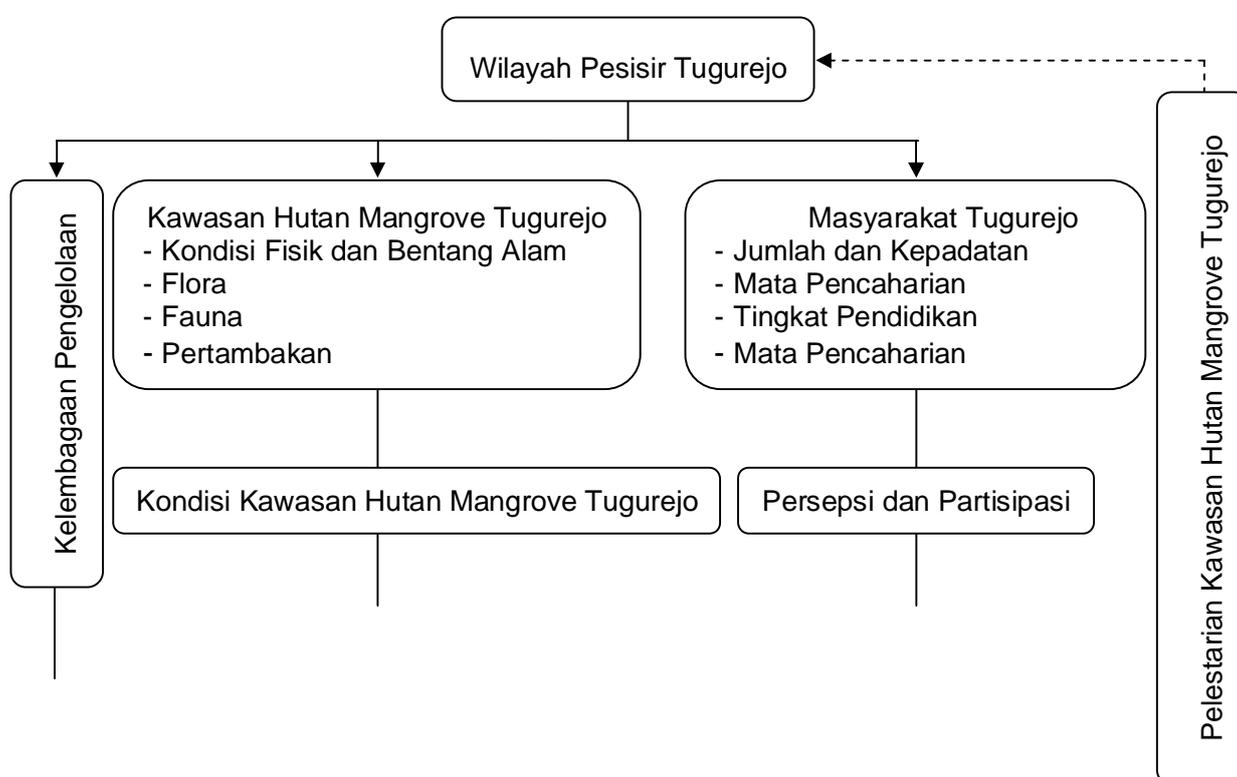
Tabel 1. Keaslian Penelitian

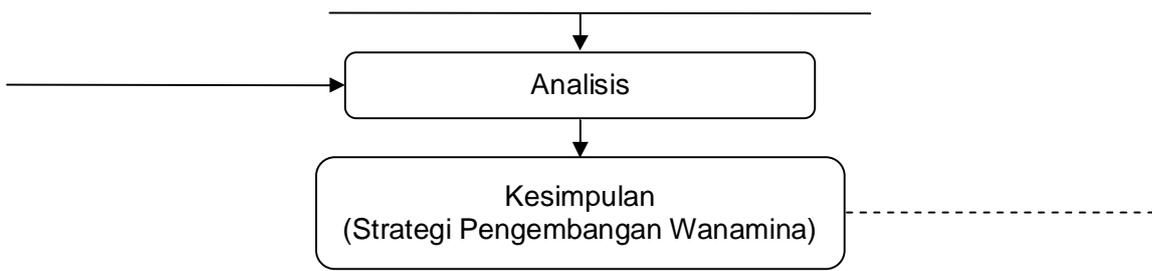
No.	Peneliti	Judul	Hasil
1	Hartina, M. Sambas Sabamurdin, dan Haryono Supriyo (November 2002).	Sistem <i>Silvofishery</i> untuk Rehabilitasi Mangrove: Studi Kasus di Desa Cemara, Indramayu	Keahlian petambak, luasan parit, dan pH tanah secara signifikan berperan pada tingkat kelulushidupan tanaman mangrove, sedangkan kedalaman air tambak, total area <i>silvofishery</i> , dan tingkat naungan tambak parit secara signifikan

		mempengaruhi produktivitas ikan budidaya.
2	Deviyanti, Atu Badariah Fauziah, dan Hildalita (Maret 2008). <i>Silvofishery</i> sebagai Salah Satu Bentuk Pengelolaan Mangrove Bersama Masyarakat	Peran masyarakat cukup besar dalam proses merehabilitasi hutan mangrove, antara lain dengan ikut serta bersama pemerintah mengembangkan sistem <i>silvofishery</i> .
3	Kusno Wibowo dan Titin Nurhandayani (September 2008). Pelestarian Hutan Mangrove melalui Pendekatan Mina Hutan (<i>Silvofishery</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana pengembangan dan pengelolaan kawasan harus didasarkan atas asas kelestarian, manfaat, dan keterpaduan. 2. Revitalisasi fungsi kawasan hutan mangrove. 3. Pengembangan kegiatan mina hutan dengan proporsi 80% kawasan untuk hutan dan 20% untuk usaha perikanan.

1.6. Kerangka Pikir Penelitian

Pengembangan wanamina pada Kawasan Hutan Mangrove Tugurejo pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir Kota Semarang melalui upaya pelestarian ekosistem hutan mangrove. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disajikan pada Gambar 1.





Keterangan:

—————▶ = Hubungan langsung

- - - - -▶ = Umpan balik

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian